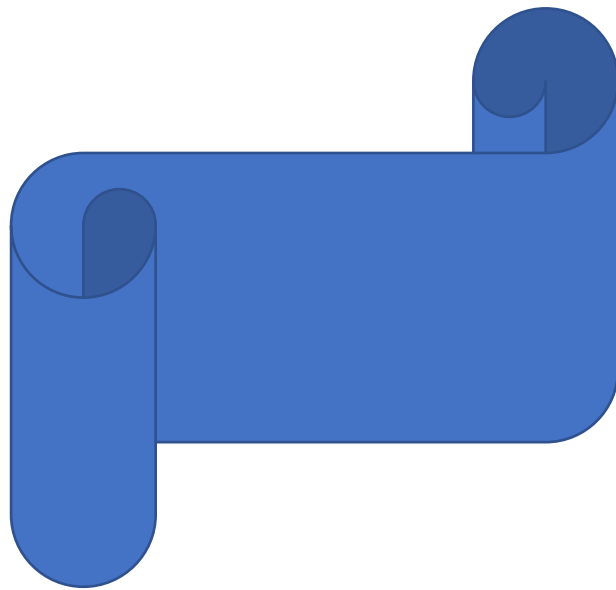


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA DENPASAR**

TAHUN 2021 – 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 telah berhasil disusun. Renstra ini disusun sebagai upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengembangkan Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik (SPBE) dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan e-government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Renstra pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut tiap tahun menjadi Renja (Rencana Kerja) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Renja diimplementasikan untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan baik, yang pada akhirnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Akhirnya terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini.

Denpasar, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197801281996121003

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Restra	2
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra	3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud	12
1.3.2 Tujuan.....	12
1.4 Sitematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia	27
2.2.2 Aset/ Modal	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3.1 Kinerja Pelayanan	33
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.1.1 Isu Strategis.....	41
3.1.2 Identifikasi Permasalahan yang Timbul.....	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1 Perumusan Strategi.....	52
5.2 Arah Kebijakan	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2022	27
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022	28
2.4	Asset Dinas Tahun 2022	29
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotik	34
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	35
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas.....	51
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kominfotik Kota Denpasar	62
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan ..	78

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dinas Kominfotik Kota Denpasar.....	26
-----	---------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan di Kota Denpasar juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK, dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Di dalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai e-Government, dan diamanatkan dalam bentuk e-Government di Kota Denpasar.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Denpasar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi, Informasi, Statistic dan Persandian dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar 2021 – 2026 yaitu "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**" dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewakadharmas sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra

1.1.2.1 Persiapan Penyusunan Renstra PD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra PD Provinsi dan kabupaten/kota.

1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD

Pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra PD. Tugas tim penyusun Renstra PD dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra PD.

Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala Dinas dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala PD

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas / pejabat lainnya
Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf PD.

1.2. Orientasi mengenai Renstra PD

Orientasi mengenai Renstra PD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra PD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra PD. Bahan orientasi mengenai Renstra PD, mencakup:

- 1) Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra PD dan penyusunan anggaran.
- 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra PD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra PD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra PD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra PD dengan penyusunan RPJMD.

1.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra PD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Renstra PD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra PD, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 2) Kebijakan pemerintah yang terkait;
 - 3) Dokumen-dokumen:
 - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra PD periode lalu;

Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra PD antara lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

1.1.2.2 Penyusunan Rancangan Renstra PD

Tahap penyusunan rancangan Renstra PD terdiri dari dua tahap, yaitu:

- 2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra PD; dan
- 2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra PD.

2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra PD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra PD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra PD.

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
 - a) data dan informasi gambaran pelayanan PD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan PD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra PD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan PD.
 - b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan PD: mencakup (1) data pendapatan PD, (2) data belanja PD, (3) data pembiayaan PD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).
2. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri dari:
 - a) analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD.

- b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD.
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Untuk penyusunan rancangan Renstra PD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, yang mencakup:
- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota; dan
 - d) program prioritas PD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- Untuk penyusunan rancangan Renstra PD kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, yang mencakup:
- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Provinsi; dan
 - d) program prioritas PD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
- a) tujuan dan sasaran RTRW;
 - b) struktur dan pola ruang; dan
 - c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi PD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:

- a) Hasil analisis gambaran pelayanan PD (potensi dan permasalahan pelayanan PD);
 - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra PD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi untuk penyusunan Renstra PD kabupaten/kota;
 - c) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - d) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi PD;
 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD; dan
 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah PD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD adalah:

- a. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD;
- b. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
- c. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
- d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
- e. Pelaksanaan forum PD.

2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra PD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra PD

1.1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

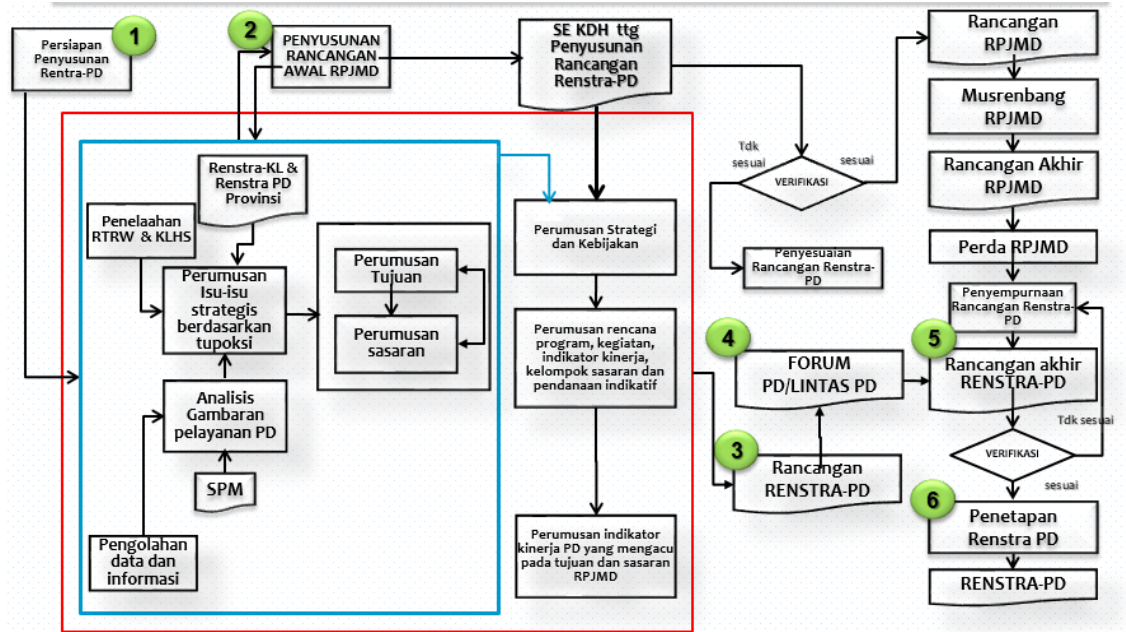
Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Bali. Sehingga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja PD.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021- 2026. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dan lain sebagainya.

Sinergitas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Dokumen Perencanaan Lainnya yaitu Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Denpasar serta Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Denpasar. Selanjutnya Renstra akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Bagan Alur tahapan dan Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai Berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
- b. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- m. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government lembaga;
- n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- o. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- p. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/SFJM.KOMINFO/4/2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Ramah Lingkungan di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara;
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- r. Peraturan Walikota Denpasar No. 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- s. Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar No. 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- t. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- u. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
- v. Surat Edaran Walikota Denpasar No. 903/379/BAPPEDA/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah menjabarkan seluruh Program yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis berisi rumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, yaitu :

1. Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Denpasar selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kota Denpasar;

2. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP
	LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai yang diamanatkan dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah merupakan **unsur pelaksana** Urusan Pemerintahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Sedangkan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kota Denpasar adalah **Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi** dan **pelaporan**, dan pelaksanaan **administrasi** Urusan Pemerintahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas, dengan dibantu oleh Sekretaris, Empat Kepala Bidang, Satu Kepala Seksi, Satu Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Dinas
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - A. Kepala Dinas
 - B. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - C. Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi :
 - 1) Seksi Informasi Publik dan Statistik
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional

D. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi :

1) Kelompok Jabatan Fungsional

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

1) Kelompok Jabatan Fungsional

F. Bidang Persandian membawahi;

1) Kelompok Jabatan Fungsional

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, adalah :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta peraturan dan prosedur yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang meliputi Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian;
- g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
 - f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - g. mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 - h. mengelola urusan Perencanaan, Data, dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
 - i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

- j. mengelola urusan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- k. mengelola urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. mengelola urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(1) Sub Bagian Umum Dan Keuangan Mempunyai Tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sbg pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan urusan perjalanan dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan layanan sound system sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - j. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban kinerja dan rencana yang akan datang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang – Bidang

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Informasi Publik dan Statistik, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Informasi Publik dan Statistik, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok

Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Publik secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan pengelolaan opini publik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan informasi publik dan statistik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan media publik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Informasi Publik dan Statistik;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (1) Seksi Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Statistik berdasarkan Rencana operasional Bidang Pengelolaan Informasi Publik serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik dan Statistik;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan layanan rekomendasi konten Large Electronic Display (LED) atau Layar Elektronik Besar sesuai Standar Operasional Prosedur untuk terjaminnya konten yang beredar di masyarakat tidak melanggar norma-norma yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan konten Large Electronic Display (LED) atau Layar Elektronik Besar milik pemerintah sesuai aturan yang berlaku agar masyarakat mendapat informasi yang akuntabel;
- g. melaksanakan pengumpulan data sektoral yang berkaitan dengan statistik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk pengembangan statistik sektoral;
- h. melakukan koordinasi/survey dengan stakeholder dalam rangka pengumpulan data sektoral sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan statistik sektoral;
- i. melakukan pengelolaan/pemeliharaan bank data, pusat data, sidok sesuai ketentuan berlaku untuk menjamin ketersediaan data sektoral dalam rangka menunjang Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik;
- j. melaksanakan koordinasi/kegiatan forum satu data selaku wali data sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan Denpasar Satu Data;
- k. mengidentifikasi, menyusun serta memverifikasi data sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk penyusunan Profil Daerah dan Denpasar Membangun;
- l. melakukan klasifikasi data sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk publikasi potensi daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam mengumpulkan dan mengembangkan data sesuai Peraturan Perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi data di Kota Denpasar;
- n. melakukan pemeliharaan/pengelolaan data spasial sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung Denpasar Satu Data;
- o. melaksanakan analisa data meliputi menghimpun, memverifikasi serta mengevaluasi data sesuai Peraturan Perundang-undangan agar menghasilkan data yang akuntabel;
- p. melaksanakan pengendalian arus data masuk sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk terjaminnya akurasi data yang akuntabel;
- q. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait analisa data sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas data statistik sektoral;
- r. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan hasil pengolahan data sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk terjaminnya konsistensi data statistik sektoral;
- s. mengelola dan memelihara *dashboard* pimpinan sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan layanan informasi keliling sesuai Peraturan Perundang-undangan guna memperluas cakupan diseminasi informasi kepada masyarakat;

- u. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Informasi Publik dan Statistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - v. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
- (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan layanan komunikasi publik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan penyiaran publik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan kemitraan komunikasi publik sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan Hubungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(1) Bidang Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Persandian berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Persandian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata kelola persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan monitoring dan audit keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Persandian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Persandian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Persandian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.

Bidang Persandian terdiri dari;

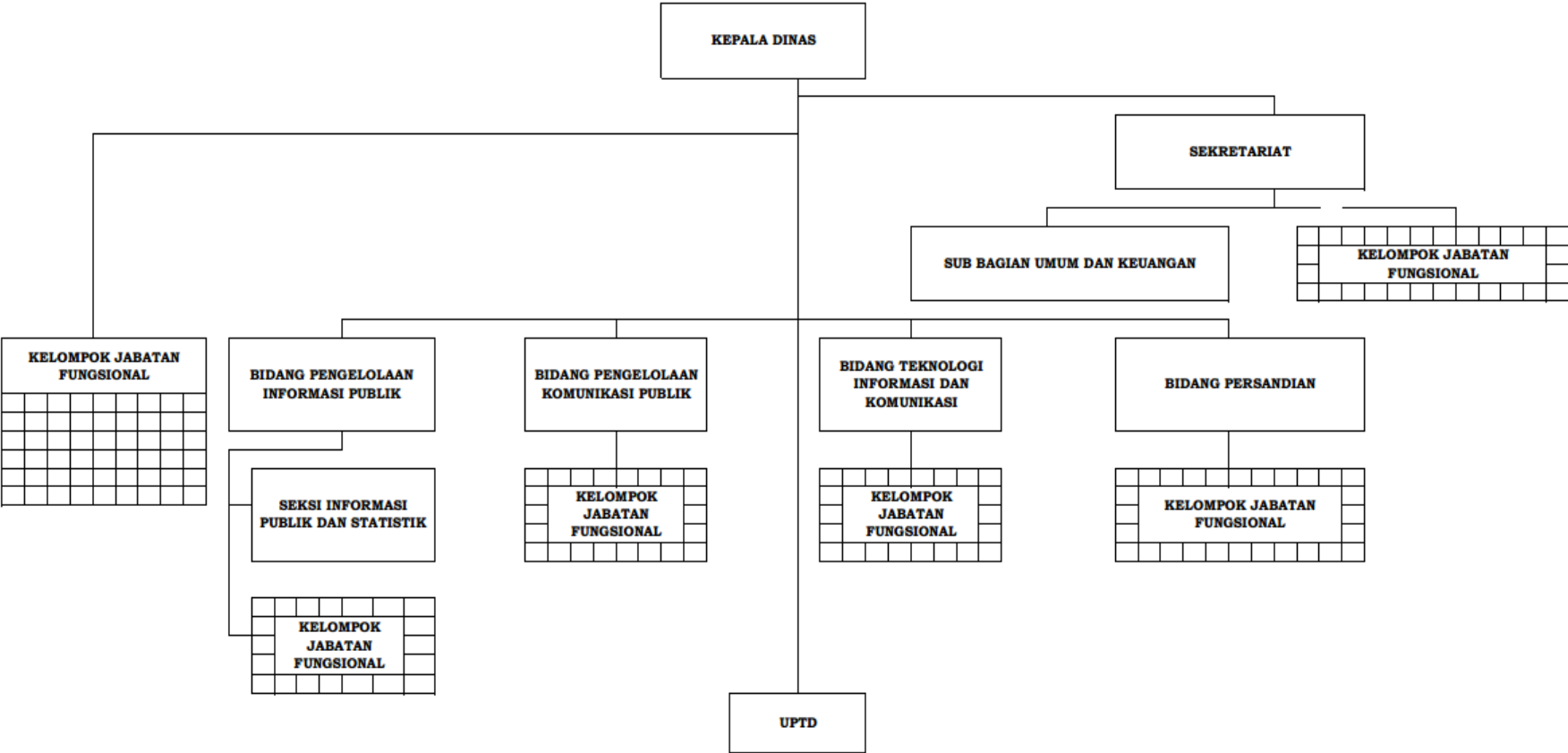
- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi **Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar** adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
 DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun 2022 seluruhnya sebanyak 113 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	1
2.	Pasca Sarjana (S2)	3
3.	Sarjana (S1)	17
4.	Diploma III	
5.	SLTA	4
	JUMLAH	25

Tabel 2.2.1.2. Komposisi Pegawai Pegawai Negeri Sipil Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	4
4.	Golongan I	-
5.	Fungsional	-
	JUMLAH	25

Tabel 2.2.1.3. Komposisi Tenaga Non PNS Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4
2.	Sarjana (S1)	62
3.	Diploma III	5
4.	Diploma II	1
5.	SLTA	16
	JUMLAH	88

2.2.2 Aset / Modal

Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.



Tabel 2.4.

BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
 Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG						JUMLAH					
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang / Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/K B/R B)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.05.01 .02.003	0001	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	CASIO	-		Pembelian	2007			1	1	35,000.00	
2	02.05.01 .02.003	0001 s/d 0009	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	Citizen / SDC 660	-		Pembelian	2009			1	9	1,755,000.00	
3	02.05.01 .02.003	0002	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	Casio / FX 82 ES	-		Pembelian	2009			1	1	300,000.00	
4	02.05.01 .02.003	0001 s/d 0003	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	Casio / DM 14 Digits	-		Pembelian	2011			1	3	600,000.00	
5	02.05.01 .02.003	0001 s/d 0006	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	Citizen / SDC 660 II 16 digit	-	Plastik	Pembelian	2012			1	6	1,500,000.00	
6	02.05.01 .02.003	0001 s/d 0002	Mesin Hitung Elektronik/Calulator	Casio DM 1600S 16 digit	-		Pembelian	2015			1	2	530,000.00	
7	02.05.01 .04.001	0001	Lemari Besi/Metal	-	-	BESI	Pembelian	1996			1	1	150,000.00	
8	02.05.01 .04.005	0003	Filing Cabinet Besi	DATASCR IP / 4 PINTU	-	BESI	Pembelian	2002	0,4 X 0,4 X 1,2 M		2	1	420,000.00	
9	02.05.01 .05.005	0001	White Board	MILLENIUM	-	KAYU	Pembelian	2001	0,6 X 0,4 M		2	1	200,000.00	
10	02.05.01 .05.005	0002	White Board	SANZIBA	-	KAYU	Pembelian	2001	0,4 X 0,6 M		2	1	200,000.00	
11	02.05.01 .05.005	0003	White Board	-	-	KAYU	Pembelian	2005			1	1	400,000.00	
12	02.05.01 .05.005	0001 s/d 0002	White Board	-	-		Pembelian	2009			1	2	525,000.00	
13	02.05.01 .05.005	0001 s/d 0004	White Board	Mitsubishi	-		Pembelian	2009			1	4	900,000.00	
14	02.05.01 .05.005	0001 s/d 0002	White Board	Mitsubhizi	-		Pembelian	2010			1	2	350,000.00	
15	02.05.01 .05.005	0012	White Board	V-Tec	-	plastik	Pembelian	2013			1	1	250,000.00	
16	02.05.01 .05.088	0001 s/d 0004	Alat Kantor Lainnya	Kotak Pengaduan	-	plastik	Pembelian	2013	20x 10x 25 cm		1	4	1,200,000.00	
17	02.05.02 .01.002	0001 s/d 0002	Meja Kerja Kayu	1/2 BIRO	-	KAYU	Pembelian	2001			2	2	390,000.00	
18	02.05.02 .01.002	0001 s/d 0003	Meja Kerja Kayu	1/2 BIRO	-	KAYU	Pembelian	2001	0,4 X 0,1 X 0,6 M		2	3	630,000.00	
19	02.05.02 .01.002	0001 s/d 0003	Meja Kerja Kayu	1/2 BIRO	-	KAYU	Pembelian	2001	0,8 X 0,4 X		2	3	600,000.00	

	02.06.02 .01.001		Telephone (PABX)	PANASO NIC / KX - T 7730			PLA STI K	Pembe lian	200 6									
76	02.06.02 .01.001	0003	Telephone (PABX)	PANASO NIC	-		PLA STI K	Pembe lian	200 6			2	1	236,600.00				
77	02.06.02 .01.004	0001	Telephone Mobile	Flexi	-		Plas tik	Hibah	201 0		1	1	349,999.00					
78	02.06.02 .06.007	0001 s/d 0006	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-			Pembe lian	200 2		1	6	75,000.00					
79	02.06.02 .06.007	0001 s/d 0014	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-		BESI	Pembe lian	200 2		1	14	250,000.00					
80	02.06.02 .06.007	0001 s/d 0034	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-		BESI /PLA STI K	Pembe lian	200 2		1	34	1,925,000.00					
81	02.06.02 .06.007	0001 s/d 0019	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-		PLA STI K	Pembe lian	200 3		1	19	1,366,130.00					
82	02.06.02 .06.007	0001 s/d 0043	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	-	-		BESI	Pembe lian	200 3		1	43	2,657,930.00					
83	02.07.01 .01.169	0001 s/d 0002	Alat Kedokteran umum lainnya	Senter Lalin panjang Ref batton	-		plas tik	Pembe lian	201 3		1	2	370,000.00					
84	02.07.01 .01.169	0001 s/d 0002	Alat Kedokteran umum lainnya	Senter lalin pendek Ref Batton	-		plas tik	Pembe lian	201 3		1	2	330,000.00					
85	02.10.02 .01.009	0001	Serial Printer	UMAX / 4900	-		BESI /PLA STI K	Pembe lian	200 3		1	1	400,000.00					
86	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0002	Peralatan Personal Komputer lainnya	FLASH DISK	-			Pembe lian	200 7		1	2	600,000.00					
87	02.10.02 .03.018	0012	Peralatan Personal Komputer lainnya	KABEL VGA	-			Pembe lian	200 7		1	1	80,000.00					
88	02.10.02 .03.018	0013	Peralatan Personal Komputer lainnya	VGA SPLITTE R	-			Pembe lian	200 7		1	1	450,000.00					
89	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0031	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-			Pembe lian	200 9		1	31	10,765,000.00					
90	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0006	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-			Pembe lian	201 0		1	6	1,080,000.00					
91	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0004	Peralatan Personal Komputer lainnya	8 GB	-			Pembe lian	201 1		1	4	500,000.00					
92	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0002	Peralatan Personal Komputer lainnya	Mouse wireless	-		plas tik	Pembe lian	201 3		1	2	600,000.00					
93	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0005	Peralatan Personal Komputer lainnya	Logitech wireless mouse	-			Pembe lian	201 4		1	5	1,500,000.00					
94	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0008	Peralatan Personal Komputer lainnya	Mouse wireless logitech	-			Pembe lian	201 6		1	8	2,000,000.00					
95	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0003	Peralatan Personal Komputer lainnya	HDMI Splitter / UHD 4Kx2K	-		Plas tik	Pembe lian	202 1	1x2	1	3	1,050,000.00					
96	02.10.02 .03.018	0001 s/d 0010	Peralatan Personal Komputer lainnya	HDTV Cable / HDTV 1080P CERT IFIET	-		Plas tik	Pembe lian	202 1	10 met er	1	10	3,000,000.00					
97	02.10.02 .04.033	0001 s/d 0444	Peralatan Jaringan lainnya	-	-			Pembe lian	200 9		1	444	5,210,000.00					
98	02.10.02 .04.033	0001 s/d 0002	Peralatan Jaringan lainnya	-	-			Pembe lian	201 0		1	2	649,000.00					
99	02.10.02 .04.033	0001 s/d 0010	Peralatan Jaringan lainnya	D-Link / DGS-108	-		Besi dan	Pembe lian	201 8		1	10	4,565,000.00					



BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
 Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG							JUMLAH				
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Mer k/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pe- beli an	Ukur an Bara ng/ Kons truksi (P, S, D)	Satu an	Keada an Baran g (B/KB /RB)	Bara ng	Har ga	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.01.03.02.001	1	Elevator /Lift	Lift	-	Besi	Pem belia n	2012	1000 Kg		1	1	672,000,000.00	
2	02.01.03.02.001	2	Elevator /Lift	Lift	-	Besi	Pem belia n	2012	1000 Kg		1	1	672,000,000.00	
3	02.02.01.01.003	4	Station Wagon	TOY OTA / AVA NZA	MHFM1BA3J6K018858 DB83431	BESI	Pem belia n	2006	1298		1	1	102,000,000.00	
4	02.02.01.01.003	1	Station Wagon	Toy ota / Inn ova	MHFXW42G6B2212167 1TR 7238427	Besi	Pem belia n	2011			1	1	245,450,000.00	
5	02.02.01.01.003	5	Station Wagon	Toy ota / Kija ng Ino va G M/T	MHFXW42GXF2318515 1TR8869392	Besi	Pem belia n	2015			1	1	275,000,000.00	
6	02.02.01.01.003	6	Station Wagon	Toy ota / Gra nd New Ava nza Velo z	MHKM5FA4JJK043569 2NR F713371	Besi	Pem belia n	2018			1	1	229,600,000.00	
7	02.02.01.02.003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOY OTA / NE W AVA NZA GM	MHFM1BA3J7K064054 DC53440		Pem belia n	2007			1	1	120,000,000.00	
8	02.02.01.02.003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan Eval ia 1,5 SV	MHBK1CG1FDJ016238 HR15944283B		Pem belia n	2013			1	1	188,528,788.00	

9	02.02.01 .03.002	1	Pick Up	Toy ota Hilu x STD m/T dies el	MROAS12G8C00096 94 2 KD 5941310	besi	Pem belia n	201 2	2.499 cc			1	1	163, 990, 000. 00		
1 0	02.02.01 .04.001	5	Sepeda Motor	YAM AHA / JUP ITE R Z	MH32P20017K35983 0 2P2360032		Pem belia n	200 7				1	1	9,00 0,00 0.00		
1 1	02.02.01 .04.001	6	Sepeda Motor	YAM AHA / JUP ITE R Z	MH32P20017K35984 7 2P2360102		Pem belia n	200 7				1	1	9,00 0,00 0.00		
1 2	02.02.01 .04.001	7	Sepeda Motor	SUZ UKI /FL 125 / RCD F 125	MH8BF45PA9J11183 4 F4A6ID111844	Besi	Hiba h	200 9	125 CC			1	1	15,6 85,0 00.0 0		
1 3	02.02.01 .04.001	8	Sepeda Motor	SUZ UKI /FL 125 / RCD F 125	MH8BF45PA9J11230 5 F4A6ID113309	Besi	Hiba h	200 9	125 CC			1	1	15,6 85,0 00.0 0		
1 4	02.02.01 .04.001	10	Sepeda Motor	Yam aha / Yam aha	MH331B002AJ53477 1 31B534811	BESI	Hiba h	201 0	115 cc			1	1	14,2 65,0 00.0 0		
1 5	02.02.01 .04.001	1	Sepeda Motor	Yam aha / New Jupi ter Z- CW	MH331B004BJ94242 0 31B-942465	besi	Pem belia n	201 1	113 CC			1	1	15,2 00,0 00.0 0		
1 6	02.02.01 .04.001	2	Sepeda Motor	Yam aha / New Jupi ter Z- CW	MH331B004BJ94242 2 31B-942468	besi	Pem belia n	201 1	113 CC			1	1	15,2 00,0 00.0 0		
1 7	02.02.01 .04.001	3	Sepeda Motor	Hon da New Sup ra X 125 D spo ke	MH1JB8111CK82542 4JB81E1822384	besi	Pem belia n	201 2				1	1	14,5 26,5 00.0 0		
1 8	02.02.01 .04.001	9	Sepeda Motor	Hon da New Sup ra X 125 D spo ke	MH1JB8114CK82541 7 JB81E1822478	besi	Pem belia n	201 2	125 cc			1	1	14,5 26,5 00.0 0		
1 9	02.02.01 .04.001	14	Sepeda Motor	Hon da New Sup ra X 125 D spo ke	MH1JB8118CK82545 3 JB81E1822480	besi	Pem belia n	201 2				1	1	14,5 26,5 00.0 0		
2 0	02.02.01 .04.001	15	Sepeda Motor	Suz uki Sho gun Axel o/ S/R	MH8BF45SADJ1750 03 F496ID443765	Besi	Pem belia n	201 3				1	1	15,4 50,0 00.0 0		

43	02.04.01.04.005	1	Lemari Penyimpan	-	-	Kayu	Pembelian	2022				1	1	7,800,000.00		
44	02.05.01.01.006	1	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	Spare part Gen set AVR Gen set Perk ins	-		Pembelian	2017				1	1	9,800,000.00		
45	02.05.01.01.006	2	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	Ryuro - Tekiro / RG2 800	-	Besi	Pembelian	2019	2.0 KVA			1	1	4,600,000.00		
46	02.05.01.02.010	1	Mesin Absen (Time Recorder)	revo / 163 BNC	-		Pembelian	2017				1	1	1,799,471.84		
47	02.05.01.02.010	2	Mesin Absen (Time Recorder)	revo / 163 BNC	-		Pembelian	2017				1	1	1,799,471.84		
48	02.05.01.04.001	2	Lemari Besi/Metal	Compacto s4 manual data script	-		Pembelian	2015				1	1	39,600,000.00		
49	02.05.01.04.002	2	Lemari Kayu	-	-	kayu dan kaca	Pembelian	2009				1	1	3,000,000.00		
50	02.05.01.04.002	3	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	2010	2mx120 cmx45 cm			1	1	4,750,000.00		
51	02.05.01.04.002	3	Lemari Kayu	-	-	Teack block	Pembelian	2011	200x120x50 cm			1	1	5,500,000.00		
52	02.05.01.04.002	4	Lemari Kayu	-	-	Kayu, Teack block finishing politura	Pembelian	2012	295x130x48 cm			1	1	9,900,000.00		
53	02.05.01.04.002	5	Lemari Kayu	-	-	Kayu, Teack block finishing politura	Pembelian	2012	300x80x40 cm			1	1	8,250,000.00		
#	05.02.01.02.001	5	Lukisan Cat Air	-	-	-	Pembelian	2014				1	1	5,000,000.00		
#	05.02.01.02.001	6	Lukisan Cat Air	-	-	-	Pembelian	2014				1	1	5,000,000.00		
#	05.02.01.02.006	1	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembelian	2013				1	1	935,000.00		
#	05.02.01.02.006	2	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembelian	2013				1	1	935,000.00		
#	05.02.01.02.006	3	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembelian	2013				1	1	935,000.00		
#	05.02.01.02.006	4	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembelian	2013				1	1	935,000.00		

#	#	05. 02. 01. 02. 006	5	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembe- lian	2013			1	1	935,000.00
#	#	05. 02. 01. 02. 006	6	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembe- lian	2013			1	1	935,000.00
#	#	05. 02. 01. 02. 006	7	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembe- lian	2013			1	1	700,000.00
#	#	05. 02. 01. 02. 006	8	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembe- lian	2013			1	1	557,500.00
#	#	05. 02. 01. 02. 006	9	Lukisan lain-lain	-	-	-	Pembe- lian	2013			1	1	615,000.00
													Total	26,147,452, 971.79



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DAFTAR ASET TETAP**

ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2022

PER 30-Jun-2022

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas KomInfo dan Statistik	40	1,834,611,900.00
	SOFTWARE	40	1,834,611,900.00
	- Software	40	1,834,611,900.00
TOTAL		40	1,834,611,900.00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar periode sebelumnya. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama 5 tahun (mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	-	-	60	71.21	78.78	86.36	93.93	100	60	71.21	78.78	86.36	93.93	100	60	71.21	78.78	86.36	93.93	100
2.	Persentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	-	-	10	20	25	33.33	50	100	10	20	25	33.33	50	100	10	20	25	33.33	50	100
3.	Jumlah Inovasi Sistem Informasi layanan publik	-	-	4 Sistem Informasi (100%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	4 Sistem Informasi (100%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	(100%)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)
4.	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi dan persandian dalam komunikasi elektronik Perangkat Daerah	-	-	-	-	25	50	75	100	-	-	25	50	75	100	-	-	25	50	75	100
5.	Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	80	80	90	100	100	100	80	80	90	100	100	100	80	80	90	100	100	100
6.	Rasio isu news/centimen berita tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media On Line	-	-	50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20	70:10:20	80:10:10	50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20	70:10:20	80:10:10	50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20	70:10:20	80:10:10
7.	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	75	75	77	79	80	100	75	75	77	79	80	100	75	75	77	79	80	100
8.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan, keamanan wilayah, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Tantangan yang dihadapi Diskominfo

- 1) Kesenambungan pembangunan e-government akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.
- 2) Kurangnya pemahaman publik tentang tata cara memanfaatkan layanan e-government.
- 3) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.
- 4) Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.

Peluang yang dimanfaatkan Diskominfo

- 1) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.
- 2) Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- 3) Peningkatan pelaksanaan e-government.
- 4) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Denpasar merupakan Ibukota dari Provinsi Bali dengan luasan mencapai 127,78 meter persegi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2021) penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 962 900 jiwa yang terdiri dari 491 500 penduduk laki-laki (50,02%) dan 471 400 penduduk perempuan (49,97%) dengan kepadatan penduduk 5.099,40/km². Kota Denpasar berkembang sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, perdagangan, maupun pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut akan meningkatkan minat penduduk di luar Kota Denpasar sendiri maupun penduduk di luar pulau Bali untuk datang sebagai wisatawan maupun dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk terutama akibat arus urbanisasi akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian di Kota Denpasar. Perkembangan wilayah Kota Denpasar tidak bisa lepas dengan pertumbuhan daerah penyangga di sekitar Kota Denpasar seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Kedua kabupaten tetangga itu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, sehingga wilayah Kota Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan dan Gianyar semakin berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan baru.

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Selain itu urusan lain yang dilaksanakan yaitu Statistik Sektoral yang meliputi penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Adapun urusan wajib komunikasi informatika statistik dan persandian dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Beberapa Permasalahan yang masih

dihadapi dalam pembangunan komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :

1. **Belum Optimalnya Transformasi Digital** dalam mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum tersedianya **Data dan Informasi Publik yang berkualitas**
3. Masih **lemahnya sistem keamanan** data dan informasi ;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berpengaruh pada arah pembangunan daerah Kota Denpasar selama lima tahun mendatang. Arah pembangunan lima tahun ini termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD Tahun 2021–2026 merupakan bagian dari tahapan keempat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang harus disusun setelah RPJMD ditetapkan.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil walikota Kota Denpasar periode 2021-2026 yaitu: "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**"

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota Denpasar pada Misi IV "**Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana**". Dalam kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi dinas, akan terlihat di dalam Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselerasi dan mendorong pembangunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan tugas pokok merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem e-government Kota Denpasar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar berperan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dibidang Infrastruktur Wilayah terlebih lagi secara makro beban keuangan daerah pasca pandemi *covid 19* menuntut seluruh perangkat daerah agar lebih inovatif dan meningkatkan fungsi koordinasi ke tingkat pusat agar bantuan pembangunan fisik khususnya terkait sarana prasarana TIK dapat terlaksana di Kota Denpasar dalam 5 tahun kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa

dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a).Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun **Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar** adalah :

- **Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah;**
- **Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah;**
- **Privasi data dan informasi;**
- **Keterbukaan informasi publik;**
- **Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut: **"OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)"** , dengan indicator tujuan adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

4.1.2 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE**
- 2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE**
- 3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE**
- 4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Indeks SPBE	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3,00	3,20	3,40	3.60	3,80	4.00
			Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3,30	3,45	3.60	3.75	3,90	4.05
			Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2,18	2,40	2.60	2.80	3.00	3.20
			Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3,55	3,65	3.75	3.85	3.95	4.05

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan arah politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Denpasar bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian, adapun strategi yang dilakukan yaitu:

- 1. Menerapkan kebijakan SPBE**
- 2. Menerapkan tata Kelola SPBE**
- 3. Menerapkan manajemen SPBE**
- 4. Menerapkan layanan SPBE**

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut di atas maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1. Penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**
- 2. Penerapan Perencanaan Strategis SPBE**
- 3. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- 4. Peningkatan kapasitas Penyelenggara SPBE**
- 5. Penerapan Manajemen SPBE**
- 6. Penerapan Pelaksanaan Audit TIK**
- 7. Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- 8. Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

- Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
- Misi 4 : Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan kebijakan SPBE2. Menerapkan tata Kelola SPBE3. Menerapkan manajemen SPBE4. Menerapkan layanan SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE2. Penerapan Perencanaan Strategis SPBE3. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi4. Peningkatan kapasitas Penyelenggara SPBE5. Penerapan Manajemen SPBE6. Penerapan Pelaksanaan Audit TIK7. Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik8. Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
2. **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
3. **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**
4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan implelementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar adalah:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
 - e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indicator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)				Indeks SPBE																
	Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE			Nilai Indeks kebijakan SPBE																

	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE			Nilai Indeks tata Kelola SPBE															
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE			Nilai Indeks manajemen SPBE															
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE			Nilai Indeks layanan SPBE															
		2	URUSAN PEMERINTAH TAHAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,498,975,557.00		16,427,590,447.50		18,070,349,492.25		19,877,384,441.48		21,865,122,885.62		24,051,635,174.18		24,051,635,174.18
		2.16	URUSAN PEMERINTAH TAHAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13,258,424,037.00		15,743,780,133.50		17,318,158,146.85		19,049,973,961.54		20,954,971,357.69		23,050,468,493.46		23,050,468,493.46

		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	7,512,694,281.00	100%	8,263,963,709.10	100%	9,090,360,080.01	100%	9,999,396,088.01	100%	10,999,335,696.81	100%	12,099,269,266.49	100%	12,099,269,266.49	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,803,561.00	1 Tahun	6,490,883,917.10	1 Tahun	7,139,972,308.81	1 Tahun	7,853,969,539.69	1 Tahun	8,639,366,493.66	1 Tahun	9,503,303,143.03	1 Tahun	9,503,303,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,803,561.00	1 Tahun	6,490,883,917.10	1 Tahun	7,139,972,308.81	1 Tahun	7,853,969,539.69	1 Tahun	8,639,366,493.66	1 Tahun	9,503,303,143.03	1 Tahun	9,503,303,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 1.2.06	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administra si Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	970,034 ,366.00	12 Bulan	1,067,0 37,802. 60	12 Bulan	1,173,7 41,582. 86	12 Bulan	1,291,1 15,741. 15	12 Bulan	1,420,2 27,315. 26	12 Bulan	1,562,2 50,046. 79	12 Bulan	1,562,2 50,046. 79	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 02	Penyedia an Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Persentase Tersediann ya Peralatan dan Perlengkap an Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	786,041 ,598.00	12 Bulan	864,645 ,757.80	12 Bulan	951,110 ,333.58	12 Bulan	1,046,2 21,366. 94	12 Bulan	1,150,8 43,503. 63	12 Bulan	1,265,9 27,853. 99	12 Bulan	1,265,9 27,853. 99	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 03	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersediann ya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	85,070, 268.00	12 Bulan	93,577, 294.80	12 Bulan	102,935 ,024.28	12 Bulan	113,228 ,526.71	12 Bulan	124,551 ,379.38	12 Bulan	137,006 ,517.32	12 Bulan	137,006 ,517.32	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 05	Penyedia an Barang Cetakan	Persentase tersediann ya Barang Cetakan	12 Bulan	12 Bulan	72,672, 500.00	12 Bulan	79,939, 750.00	12 Bulan	87,933, 725.00	12 Bulan	96,727, 097.50	12 Bulan	106,399 ,807.25	12 Bulan	117,039 ,787.98	12 Bulan	117,039 ,787.98	Dinas Komi nfo

			dan Penggandaan	dan Penggandaan																dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersediannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	26,250, 000.00	12 Bulan	45,000, 000.00	12 Bulan	49,500, 000.00	12 Bulan	54,450, 000.00	12 Bulan	59,895, 000.00	12 Bulan	65,884, 500.00	12 Bulan	65,884, 500.00	Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	641,856 ,354.00	12 Bulan	706,041 ,989.40	12 Bulan	776,646 ,188.34	12 Bulan	854,310 ,807.17	12 Bulan	939,741 ,887.89	12 Bulan	1,033,7 16,076. 68	12 Bulan	1,033,7 16,076. 68	Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	418,081 ,354.00	12 Bulan	459,889 ,489.40	12 Bulan	505,878 ,438.34	12 Bulan	556,466 ,282.17	12 Bulan	612,112 ,910.39	12 Bulan	673,324 ,201.43	12 Bulan	673,324 ,201.43	Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Denpasar

			n Dinas Jabatan																	
		2.16.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	223,775,000.00	12 Bulan	246,152,500.00	12 Bulan	270,767,750.00	12 Bulan	297,844,525.00	12 Bulan	327,628,977.50	12 Bulan	360,391,875.25	12 Bulan	360,391,875.25	Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98	100%	4,625,759,502.07	100%	4,625,759,502.07	
		2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98	100%	4,625,759,502.07	100%	4,625,759,502.07	Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	183,715,000.00	1 Laporan	202,086,500.00	1 Laporan	222,295,150.00	1 Laporan	244,524,665.00	1 Laporan	268,977,131.50	1 Laporan	268,977,131.50	Dinas Kominformasi dan Statistik

			Komunikasi Publik	Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat																Kota Denpasar
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita	685,647,192.00	1200 Berita	754,211,911.20	1200 Berita	829,633,102.32	1200 Berita	912,596,412.55	1200 Berita	1,003,856,053.81	1200 Berita	1,104,241,659.19	1200 Berita	1,104,241,659.19	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	1,130,661,940.00	80	1,243,728,134.00	85	1,368,100,947.40	90	1,504,911,042.14	95	1,655,402,146.35	100 %	1,820,942,360.99	100 %	1,820,942,360.99	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 2.2.01. 06	Pengelolaan Media Elektronik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	116,787,800.00	80	128,466,580.00	85	141,313,238.00	90	155,444,561.80	95	170,989,017.98	100 %	188,087,919.78	100 %	188,087,919.78	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	80	80	158,965,200.00	80	315,232,156.00	85	346,755,371.60	90	381,430,908.76	95	419,573,999.64	100 %	461,531,399.60	100 %	461,531,399.60	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar		1 kali pameran HUT Kota Denpasar	481,701,600.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	529,871,760.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	582,858,936.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	641,144,829.60	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	705,259,312.56	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	705,259,312.56	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Publikasi Media Sosial	10 Kali	10 Kali		10 Kali	52,400,600.00	10 Kali	57,640,660.00	10 Kali	63,404,726.00	10 Kali	69,745,198.60	10 Kali	76,719,718.46	10 Kali	76,719,718.46	Dinas Kominfo dan

			kat, Media dan Kemitraan Komunitas																Statistik Kota Denpasar	
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	80%	3,653,667,624.00	80%	4,320,360,443.20	85%	4,752,396,487.52	90%	5,227,636,136.27	95%	5,750,399,749.90	100%	6,325,439,724.89	100%	6,325,439,724.89	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	80%	80%	2,141,563,432.00	80%	2,657,045,832.00	85%	2,922,750,415.20	90%	3,215,025,456.72	95%	3,536,528,002.39	100%	3,890,180,802.63	100%	3,890,180,802.63	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,141,563,432.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,657,045,832.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,922,750,415.20	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi nya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 %	100 %	1,512,104,192.00	1,663,314,611.20	100 %	1,829,646,072.32	100 %	2,012,610,679.55	100 %	2,213,871,747.51	100 %	2,435,258,922.26	100 %	2,435,258,922.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 Kajian	1 Kajian	167,096,032.00	183,805,635.20	1 Kajian	202,186,198.72	1 Kajian	222,404,818.59	1 Kajian	244,645,300.45	1 Kajian	269,109,830.50	1 Kajian	269,109,830.50	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Pengembangan Aplikasi	6 Pengembangan Aplikasi	348,345,264.00	383,179,790.40	6 Pengembangan Aplikasi	421,497,769.44	6 Pengembangan Aplikasi	463,647,546.38	6 Pengembangan Aplikasi	510,012,301.02	6 Pengembangan Aplikasi	561,013,531.12	6 Pengembangan Aplikasi	561,013,531.12	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100% (5 Sistem Informasi)	100% (5 Sistem Informasi)	308,607,264.00	339,467,990.40	100% (5 Sistem Informasi)	373,414,789.44	100% (5 Sistem Informasi)	410,756,268.38	100% (5 Sistem Informasi)	451,831,895.22	100% (5 Sistem Informasi)	497,015,084.74	100% (5 Sistem Informasi)	497,015,084.74	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	550 orang	550 orang	263,345,600.00	550 orang	289,680,160.00	550 orang	318,648,176.00	550 orang	350,512,993.60	550 orang	385,564,292.96	550 orang	424,120,722.26	550 orang	424,120,722.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Layanan Government Cloud Computing	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	424,710,032	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	467,181,035.20	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	513,899,138.72	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	565,289,052.59	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	621,817,957.85	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	683,999,753.64	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	683,999,753.64	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					119,981,850.00		131,980,035.00		145,178,038.50		159,695,842.35		175,665,426.59		175,665,426.59		
		2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	70%	70%		119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35	100%	175,665,426.59	100%	175,665,426.59		

		2.20.0 2.2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	70%	70%		75%	119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35	100 %	175,665,426.59	100 %	175,665,426.59	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.0 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun		1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	39,994,050.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	43,993,455.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	48,392,800.50	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	53,232,080.55	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	58,555,288.61	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	58,555,288.61	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.0 2.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner		1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	79,987,800.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	87,986,580.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	96,785,238.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	106,463,761.80	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	117,110,137.98	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur, dan 2 buah banner	117,110,137.98	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

				Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit		1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				240,551,520.00	563,828,464.00		620,211,310.40		682,232,441.44		750,455,685.58		825,501,254.14		825,501,254.14		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMARAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	563,828,464.00	60%	620,211,310.40	65%	682,232,441.44	80%	750,455,685.58	100%	825,501,254.14	100%	825,501,254.14		
		2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	563,828,464.00	60%	620,211,310.40	65%	682,232,441.44	70%	750,455,685.58	80%	825,501,254.14	80%	825,501,254.14		Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.21.0 2.2.01. 04	Penyedia an Layanan Keamana n Informasi Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Terlaksana nya layanan Keamanan Informasi	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	240,551 ,520.00	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	563,828 ,464.00	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	620,211 ,310.40	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	682,232 ,441.44	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	750,455 ,685.58	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	825,501 ,254.14	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	825,501 ,254.14	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
--	--	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di atas. Selanjutnya pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	-	3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,05
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,05

Adapun indikator kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD

Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026, ditampilkan pada table 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Formulasi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah	4 KIM	4 KIM	8 KIM	12 KIM	16 KIM	20 KIM	25 KIM	25 KIM	Jumlah pendataan pelaksanaan kegiatan pengembangan KIM
2	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	80%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) / (Jumlah OPD) X (100%)
3	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	(Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasi kan secara elektronik) / (Jumlah layanan) X (100%)
II	URUSAN STATISTIK										
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) / (Jumlah OPD) X (100%)
III	URUSAN PERSANDIAN										
1	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	10%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) / (Jumlah area penilaian) X (100%)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang komunikasi informatika, statistic dan persandian merupakan pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar didalam penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini juga menjadi pedoman dalam menyusun program prioritas tiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama Tahun 2021 - 2026. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai lima tahun dengan menganalisa potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis tersebut juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Hal – hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan instansi terkait lainnya.

Denpasar, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197801281996121003

LAMPIRAN :



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Graha Sewaka Dharma Jl Majapahit No. 1 Denpasar Telp. 0361-431229

website : www.denpasarkota.go.id

e-mail: Kominfo@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KOTA DENPASAR

NOMOR : 050/1161/DKIS

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KOTA DENPASAR

TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencakup visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021- 2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - b. mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 23 Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197801281996121003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Kota Denpasar.
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR

TANGGAL 23 JUNI 2022

NOMOR : 050/1161/DKIS

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KOTA DENPASAR

TAHUN 2021 - 2026

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar |
| Ketua | : | Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar |
| Sekretaris | : | JFT Perencana Ahli Muda. |
| Anggota | : | |
1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 4. Kepala Bidang Persandian
 5. Kepala Seksi Informasi Publik dan Statistik
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 7. JFT Fungsional Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 23 Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197801281996121003



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Majapahit No. 1 Denpasar 80233 Telp. 431229

Website :
www.denpasarkota.go.id

e-mail: kominfo@denpasarkota.go.

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi misi, tetapi visi misi dirumuskan oleh Walikota	
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi misi, tetapi visi misi	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
				dirumuskan oleh Walikota	
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah.	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Denpasar, 23 Juni 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 197801281996121003

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peningkat Daerah Penanggung jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)				Indeks SPBE																
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE			Nilai Indeks kebijakan SPBE		3.00		3.20		3.40		3.60		3.80		4.00		4.00		
	Meningkatnya kematangan			Nilai Indeks tata Kelola SPBE		3.30		3.45		3.60		3.75		3.90		4.05		4.05		

	tata Kelola SPBE																		
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE			Nilai Indeks manajemen SPBE		2.18		2.40		2.60		2.80		3.00		3.20		3.20	
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE			Nilai Indeks layanan SPBE		3.55		3.65		3.75		3.85		3.95		4.05		4.05	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13,498,975,557.00		16,427,590,447.50		18,070,349,492.25		19,877,384,441.48		21,865,122,885.62		24,051,635,174.18		24,051,635,174.18	
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13,258,424,037.00		15,743,780,133.50		17,318,158,146.85		19,049,973,961.54		20,954,971,357.69		23,050,468,493.46		23,050,468,493.46	

		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	7,512,694,281.00	100%	8,263,963,709.10	100%	9,090,360,080.01	100%	9,999,396,088.01	100%	10,999,335,696.81	100%	12,099,269,266.49	100%	12,099,269,266.49	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,803,561.00	1 Tahun	6,490,883,917.10	1 Tahun	7,139,972,308.81	1 Tahun	7,853,969,539.69	1 Tahun	8,639,366,493.66	1 Tahun	9,503,303,143.03	1 Tahun	9,503,303,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,803,561.00	1 Tahun	6,490,883,917.10	1 Tahun	7,139,972,308.81	1 Tahun	7,853,969,539.69	1 Tahun	8,639,366,493.66	1 Tahun	9,503,303,143.03	1 Tahun	9,503,303,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 1.2.06	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administra si Umum Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	970,034 ,366.00	12 Bulan	1,067,0 37,802. 60	12 Bulan	1,173,7 41,582. 86	12 Bulan	1,291,1 15,741. 15	12 Bulan	1,420,2 27,315. 26	12 Bulan	1,562,2 50,046. 79	12 Bulan	1,562,2 50,046. 79	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 02	Penyedia an Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Persentase Tersediann ya Peralatan dan Perlengkap an Kantor Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	786,041 ,598.00	12 Bulan	864,645 ,757.80	12 Bulan	951,110 ,333.58	12 Bulan	1,046,2 21,366. 94	12 Bulan	1,150,8 43,503. 63	12 Bulan	1,265,9 27,853. 99	12 Bulan	1,265,9 27,853. 99	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 03	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersediann ya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikas i, Informatik a dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	85,070, 268.00	12 Bulan	93,577, 294.80	12 Bulan	102,935 ,024.28	12 Bulan	113,228 ,526.71	12 Bulan	124,551 ,379.38	12 Bulan	137,006 ,517.32	12 Bulan	137,006 ,517.32	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
		2.16.0 1.2.06. 05	Penyedia an Barang Cetakan	Persentase tersediann ya Barang Cetakan	12 Bulan	12 Bulan	72,672, 500.00	12 Bulan	79,939, 750.00	12 Bulan	87,933, 725.00	12 Bulan	96,727, 097.50	12 Bulan	106,399 ,807.25	12 Bulan	117,039 ,787.98	12 Bulan	117,039 ,787.98	Dinas Komi nfo

			dan Penggandaan	dan Penggandaan																dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersediannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	26,250, 000.00	12 Bulan	45,000, 000.00	12 Bulan	49,500, 000.00	12 Bulan	54,450, 000.00	12 Bulan	59,895, 000.00	12 Bulan	65,884, 500.00	12 Bulan	65,884, 500.00	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	641,856 ,354.00	12 Bulan	706,041 ,989.40	12 Bulan	776,646 ,188.34	12 Bulan	854,310 ,807.17	12 Bulan	939,741 ,887.89	12 Bulan	1,033,7 16,076. 68	12 Bulan	1,033,7 16,076. 68	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	418,081 ,354.00	12 Bulan	459,889 ,489.40	12 Bulan	505,878 ,438.34	12 Bulan	556,466 ,282.17	12 Bulan	612,112 ,910.39	12 Bulan	673,324 ,201.43	12 Bulan	673,324 ,201.43	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

			n Dinas Jabatan																	
		2.16.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	223,775,000.00	12 Bulan	246,152,500.00	12 Bulan	270,767,750.00	12 Bulan	297,844,525.00	12 Bulan	327,628,977.50	12 Bulan	360,391,875.25	12 Bulan	360,391,875.25	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98	100%	4,625,759,502.07	100%	4,625,759,502.07	
		2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98	100%	4,625,759,502.07	100%	4,625,759,502.07	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	183,715,000.00	1 Laporan	202,086,500.00	1 Laporan	222,295,150.00	1 Laporan	244,524,665.00	1 Laporan	268,977,131.50	1 Laporan	268,977,131.50	Dinas Kominfo dan Statistik

			Komunikasi Publik	Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat																Kota Denpasar
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita	685,647,192.00	1200 Berita	754,211,911.20	1200 Berita	829,633,102.32	1200 Berita	912,596,412.55	1200 Berita	1,003,856,053.81	1200 Berita	1,104,241,659.19	1200 Berita	1,104,241,659.19	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	1,130,661,940.00	80	1,243,728,134.00	85	1,368,100,947.40	90	1,504,911,042.14	95	1,655,402,146.35	100 %	1,820,942,360.99	100 %	1,820,942,360.99	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 2.2.01. 06	Pengelolaan Media Elektronik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	116,787,800.00	80	128,466,580.00	85	141,313,238.00	90	155,444,561.80	95	170,989,017.98	100 %	188,087,919.78	100 %	188,087,919.78	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	80	80	158,965,200.00	80	315,232,156.00	85	346,755,371.60	90	381,430,908.76	95	419,573,999.64	100 %	461,531,399.60	100 %	461,531,399.60	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar		1 kali pameran HUT Kota Denpasar	481,701,600.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	529,871,760.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	582,858,936.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	641,144,829.60	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	705,259,312.56	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	705,259,312.56	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 2.2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Publikasi Media Sosial	10 Kali	10 Kali		10 Kali	52,400,600.00	10 Kali	57,640,660.00	10 Kali	63,404,726.00	10 Kali	69,745,198.60	10 Kali	76,719,718.46	10 Kali	76,719,718.46	Dinas Kominfo dan

			kat, Media dan Kemitraan Komunitas																Statistik Kota Denpasar	
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	80%	3,653,667,624.00	80%	4,320,360,443.20	85%	4,752,396,487.52	90%	5,227,636,136.27	95%	5,750,399,749.90	100%	6,325,439,724.89	100%	6,325,439,724.89	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	80%	80%	2,141,563,432.00	80%	2,657,045,832.00	85%	2,922,750,415.20	90%	3,215,025,456.72	95%	3,536,528,002.39	100%	3,890,180,802.63	100%	3,890,180,802.63	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,141,563,432.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,657,045,832.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,922,750,415.20	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,215,025,456.72	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,536,528,002.39	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,890,180,802.63	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,890,180,802.63	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terealisasi Di Lingkup Pemerintahan Kota Denpasar	100 %	100 %	1,512,104,192.00	1,663,314,611.20	100 %	1,829,646,072.32	100 %	2,012,610,679.55	100 %	2,213,871,747.51	100 %	2,435,258,922.26	100 %	2,435,258,922.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 Kajian	1 Kajian	167,096,032.00	183,805,635.20	1 Kajian	202,186,198.72	1 Kajian	222,404,818.59	1 Kajian	244,645,300.45	1 Kajian	269,109,830.50	1 Kajian	269,109,830.50	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Pengembangan Aplikasi	6 Pengembangan Aplikasi	348,345,264.00	383,179,790.40	6 Pengembangan Aplikasi	421,497,769.44	6 Pengembangan Aplikasi	463,647,546.38	6 Pengembangan Aplikasi	510,012,301.02	6 Pengembangan Aplikasi	561,013,531.12	6 Pengembangan Aplikasi	561,013,531.12	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100% (5 Sistem Informasi)	100% (5 Sistem Informasi)	308,607,264.00	339,467,990.40	100% (5 Sistem Informasi)	373,414,789.44	100% (5 Sistem Informasi)	410,756,268.38	100% (5 Sistem Informasi)	451,831,895.22	100% (5 Sistem Informasi)	497,015,084.74	100% (5 Sistem Informasi)	497,015,084.74	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	550 orang	550 orang	263,345,600.00	550 orang	289,680,160.00	550 orang	318,648,176.00	550 orang	350,512,993.60	550 orang	385,564,292.96	550 orang	424,120,722.26	550 orang	424,120,722.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.0 3.2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Layanan Government Cloud Computing	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	424,710,032	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	467,181,035.20	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	513,899,138.72	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	565,289,052.59	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	621,817,957.85	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	683,999,753.64	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domain,	683,999,753.64	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						119,981,850.00		131,980,035.00		145,178,038.50		159,695,842.35		175,665,426.59		175,665,426.59	
		2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	70%	70%		75%	119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35	100%	175,665,426.59	100%	175,665,426.59	

		2.20.0 2.2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	70%	70%		75%	119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35	100 %	175,665,426.59	100 %	175,665,426.59	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.0 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun		1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	39,994,050.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	43,993,455.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	48,392,800.50	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	53,232,080.55	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	58,555,288.61	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	58,555,288.61	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.0 2.2.01.03	Memban- gun Metadat a Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner		1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	79,987,800.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	87,986,580.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	96,785,238.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	106,463,761.80	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	117,110,137.98	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60 lembar Brosur , dan 2 buah banner	117,110,137.98	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

				Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit		1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkrit	-	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				240,551,520.00	563,828,464.00		620,211,310.40		682,232,441.44		750,455,685.58		825,501,254.14		825,501,254.14		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMARAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	563,828,464.00	60%	620,211,310.40	65%	682,232,441.44	80%	750,455,685.58	100%	825,501,254.14	100%	825,501,254.14		
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	563,828,464.00	60%	620,211,310.40	65%	682,232,441.44	70%	750,455,685.58	80%	825,501,254.14	80%	825,501,254.14		Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.21.0 2.2.01. 04	Penyedia an Layanan Keamana n Informasi Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Terlaksana nya layanan Keamanan Informasi	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	240,551 ,520.00	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	563,828 ,464.00	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	620,211 ,310.40	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	682,232 ,441.44	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	750,455 ,685.58	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	825,501 ,254.14	2 Sistem Inform asi terudit , Pelatih an 48 OPD tentan g keama nan Inform asi, 1 Aplikas i mobile tanda tangan elektro nik	825,501 ,254.14	Dinas Komi nfo dan Statis tik Kota Denp asar
--	--	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

